

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan masyarakat desa merupakan ruang lingkup yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menanggulangi kemiskinan dalam tingkatan pemerintahan desa. Suatu keberhasilan yang dapat memberikan perbedaan dari segi keadaan lebih baik, lebih sempurna dari sebelum adanya program di suatu wilayah tertentu yang bisa disebut sebagai proses pembangunan masyarakat desa. Masyarakat desa menjadi yang paling utama akan merasakan manfaat atas pembangunan desa. Namun, pembangunan tersebut seringkali dikaitkan dengan permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat desa.

Kemiskinan adalah suatu permasalahan kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengangguran, tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan geografis. Kemiskinan disebabkan karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama sehingga ada masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati manfaat dari hasil pembangunan itu (Safuridar & Putri, 2019). Salah satu jenis kemiskinan yang seringkali dialami di pedesaan yaitu kemiskinan ekonomi. Kemiskinan ekonomi merupakan suatu kondisi masyarakat yang taraf hidupnya dikaitkan dengan mekanisme ekonomi yang dihadapi di suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, kemiskinan timbul di masyarakat apabila masyarakat tidak dapat memiliki pendapatan dan tidak memiliki pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan ini harus segera ditanggulangi agar masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Penanggulangan kemiskinan memiliki cakupan aspek yang luas baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Penanggulangan kemiskinan ini juga salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pengentasan kemiskinan ini merupakan suatu tantangan besar karena angka kemiskinan di DIY masih relatif tinggi di Pulau Jawa.

**TABEL 1.1**

**Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa  
Tahun 2016-2020**

<b>PROVINSI</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>DKI Jakarta</b>	3.75	3.77	3.57	3.47	4.53
<b>Jawa Barat</b>	8.95	8.71	7.45	6.91	7.88
<b>Jawa Tengah</b>	13.27	13.01	11.32	10.80	11.41
<b>DI Yogyakarta</b>	<b>13.34</b>	<b>13.02</b>	<b>12.13</b>	<b>11.70</b>	<b>12.28</b>
<b>Jawa Timur</b>	12.05	11.20	10.98	10.37	11.09
<b>Banten</b>	5.42	5.45	5.24	5.09	5.92
<b>Indonesia</b>	10.12	10.70	9.66	9.22	10.19

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta relatif menurun jika dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan persentase, namun persentase jumlah penduduk miskin di DIY masih lebih tinggi dibandingkan di provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Bahkan persentase penduduk miskin di DIY ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Indonesia. Kondisi seperti ini, pemerintah perlu usaha yang lebih untuk mengambil kebijakan agar dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi DIY.

Dalam perencanaan pembangunan masyarakat akan berperan aktif menjadi salah satu bentuk *stakeholder* yang penting dan akan dilibatkan sebagai bentuk pemerataan lingkungan serta perencanaan pembangunan daerah masing-masing. Salah satu peran masyarakat sebagai *stakeholder* dalam pembangunan yaitu menjadi wirausahawan. Wirausahawan ini akan menjadi batu loncatan untuk menunjang tujuan utama dari pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran utama pembangunan dapat terwujud melalui wirausahawan dengan dicapainya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai dorongan motivasi serta inovasi bagi penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian. Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagian besar berada di pedesaan karena perekonomian dan tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih rendah.

Pergerakan perekonomian di pedesaan masih seringkali dinilai lambat dibandingkan dengan pembangunan ekonomi perkotaan yang mengakibatkan kantong-kantong kemiskinan banyak terjadi di kalangan masyarakat desa. Masyarakat desa lebih sering melakukan urbanisasi ke perkotaan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Padahal masyarakat bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh desa.

Masyarakat desa yang memiliki karakter tahan dengan kemalangan bisa dijadikan modal awal lahirnya seorang wirausaha desa karena salah satu syarat kepribadian dari seorang wirausaha sukses yaitu mau bekerja keras dan tahan banting. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pergerakan ekonomi desa yaitu dengan mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Kewirausahaan akan menjadi strategi untuk pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dimana

sumber daya serta fasilitas disediakan secara spontan oleh masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi pedesaan (Ansari et al., 2013).

Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan sesamanya. Salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan melakukan pengembangan usaha. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. Ar-Ra'd : 11.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ  
اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْئَالٍ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

*Artinya : “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga Mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”*

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya di dalam Islam, Allah SWT telah menentukan rezeki untuk setiap umat-Nya. Ayat tersebut juga memberikan peluang bagi umat Islam untuk memberdayakan dirinya dengan melakukan kerja keras seperti membangun sebuah usaha dalam lingkungan UMKM.

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan memberikan pengaruh besar yang positif bagi perekonomian. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk lebih mengembangkan eksistensi UMKM. Suatu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi titik awal pengembangan usaha yang dapat bersinergi dengan pengembangan usaha masyarakat. Untuk mendukung pengembangan usaha tersebut

terdapat program yang memberikan pendampingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha selanjutnya.

Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi masyarakat di suatu negara dapat membantu mengatasi masalah ekonomi makro seperti pengangguran, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan inovasi (Rizky et al., 2022). Sejak saat itu, telah tercipta berbagai produk baru yang memberikan manfaat dan peluang bagi masyarakat lain untuk membuka usaha baru lainnya. Kehadiran UMKM bukan hanya meningkatkan pendapatan namun pula pada pemerataan pendapatan. Hal ini mampu dimengerti lantaran sektor UMKM melibatkan banyak pihak dengan berbagai macam usaha.

Pemerintah daerah mempunyai peran penting untuk menumbuh kembangkan UMKM di daerah. UMKM harus terus didorong serta diperkuat untuk sama-sama membangun ekonomi daerah. UMKM banyak tumbuh diberbagai wilayah desa yang wajib dikembangkan oleh pemerintah daerah karena hal tersebut dapat menjadi satu kunci bagi peningkatan perekonomian daerah.

Perkembangan ekonomi di desa terlihat dari kemajuan UMKM yang dijalankan masyarakat dengan mengembangkan individu yang lebih mandiri. Masyarakat akan berkembang dengan memiliki pengembangan potensi serta kemampuan sesuai dengan apa yang dimiliki dan dikehendaki. Namun, masyarakat perlu adanya pendampingan dari tenaga ahli dalam pengembangan kelompok swadaya yang sudah memiliki keahlian khusus di bidangnya serta pendidikan dan pelatihan yang sudah dikuasai. Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan adanya kerjasama dengan tenaga ahli pengembangan kelompok swadaya yang bertugas menjadi mitra atau fasilitator bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Masyarakat dapat memanfaatkan adanya fasilitator ini sebagai konsultan yang dapat memberikan penjelasan atau arahan tentang modal,

pemasaran, pelatihan, relasi, dan perluasan pasar dalam mengembangkan usaha. Pemberdayaan bisa dilakukan dengan melalui UMKM yang sudah ada di masyarakat yang dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Penerapan pemberdayaan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat maka diwujudkan dengan salah satu adanya program yang bernama Desa Preneur.

Menurut Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2020 Nomor : 001.B/KEP/BID-IV/I/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Preneur menimbang bahwa arahan dari Gubernur DIY dalam Seminar Pembangunan dan Kewirausahaan Desa dengan Tema Strategi Kewilayahan untuk Memacu Kewirausahaan Desa pada 19 April 2016, terutama tentang perlunya menekan angka kemiskinan dengan pola pemberdayaan melalui pengembangan kewirausahaan yang memiliki nilai tambah dan daya saing berkelanjutan. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu melakukan pendampingan dalam konteks desa untuk menumbuhkan iklim kewirausahaan agar meningkatkan pendapatan masyarakat yang disebut dengan Desa Preneur.

Program Desa Preneur merupakan salah satu respon dari isu kemiskinan yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat melalui kegiatan pengembangan potensi usaha, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan meningkatkan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha. Desa Preneur merupakan wilayah desa yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan unit - unit usaha skala desa yang digerakan oleh masyarakat desa itu sendiri berdasarkan pengembangan pengetahuan, keterampilan berwirausaha, mutu produk/jasa, dan daya saing untuk meningkatkan perekonomian desa serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Program Desa Preneur ini memiliki tujuan agar meningkatkan perekonomian bagi masyarakat desa dengan berbasis kewirausahaan. Program tersebut berupa pemberdayaan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat desa. Masyarakat desa yang masih memiliki karakteristik kurang mampu dalam mengembangkan usahanya karena faktor tingkat pendidikan yang rendah maka diperlukannya upaya pemberdayaan usaha. Kegiatan Desa Preneur ini yaitu berupa pemberian pendidikan, pelatihan, fasilitasi, dan pendampingan kewirausahaan. Konsep kewirausahaan pada pemberdayaan program tersebut akan menjadi hal penting untuk menunjukkan potensi peranan masyarakat desa agar dapat menggerakkan perekonomian desa. Program ini menyediakan dukungan untuk pengembangan ekonomi desa melalui penyediaan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi UMKM.

Program Desa Preneur ini merupakan program yang telah dilaksanakan di 4 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman.

**TABEL 1.2**  
**LOKUS DESA PRENEUR**

NO	KALURAHAN	KABUPATEN
1	Bejiharjo	Gunung Kidul
2	Pagerharjo	Kulon Progo
3	Sabdodadi	Bantul
4	Bangunkerto	Sleman

*Sumber : Laporan Hasil Kajian Desa Mandiri Budaya (2020)*

Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengetahui tentang pengaruh program Desa Preneur terhadap pengembangan usaha masyarakat. Penelitian tersebut difokuskan di Kalurahan Pagerharjo, Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah dengan tingkat persentase penduduk miskin yang masih tinggi dibandingkan

dengan kabupaten lainnya di DIY. Berikut merupakan data persentase penduduk miskin di wilayah DIY sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Persentase Penduduk Miskin Daerah Istimewa Yogyakarta**

<b>Kabupaten</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Kulon Progo</b>	20,30	20,03	18,30	17,39	18,01
<b>Bantul</b>	14,55	14,07	13,43	12,92	13,50
<b>Gunung Kidul</b>	19,34	18,65	17,12	16,61	17,07
<b>Sleman</b>	8,21	8,13	7,65	7,41	8,12
<b>Kota Yogyakarta</b>	7,70	7,64	6,98	6,84	7,72

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

Berdasarkan data jumlah persentase penduduk miskin ditahun 2016-2020 menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten mengalami penurunan persentase, namun Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah persentase paling tinggi. Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 jumlah persentase penduduk miskin sebesar 20,30%, tahun 2017 sebesar 20,03%, tahun 2018 sebesar 18,30%, tahun 2019 sebesar 17,39%, dan tahun 2020 sebesar 18,01%.

Pada penelitian ini, studi kasus dilakukan di Kalurahan Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kalurahan Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo melihat berdasarkan data BPS dari tahun 2016-2020 merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah persentase penduduk miskin paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu Kalurahan Pagerharjo merupakan Desa Mandiri Budaya yang mana telah melaksanakan program Desa Preneur dari tahun 2019 lalu. Desa Preneur tersebut hingga saat ini masih berstatus aktif dan berkembang. Untuk itu penelitian ini mencoba melihat apakah program Desa Preneur yang masih aktif ini mampu memberikan pengaruh terhadap pengembangan usaha masyarakat.

Program Desa Preneur ini memberikan fasilitas berupa pendampingan dan pelatihan bagi anggota. Partisipasi masyarakat dalam program Desa Preneur di desa binaan sangat penting dimulai sejak tahap awal hingga keberlanjutan program. Kalurahan Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu desa binaan program Desa Preneur. Di kalurahan tersebut terdapat UMKM produksi “Wedang Rempah Lengger”. Di Kalurahan Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo memiliki salah satu potensi sumber daya alam yaitu melimpahnya bahan rempah alami seperti kunyit, jahe, temu, kencur, gula aren, dan lengkuas. Mulai dari potensi yang dimiliki tersebut, awal tahun 2019 Kalurahan Pagerharjo ini menjadi desa budaya yang bekerja sama dengan pihak pemerintahan daerah yaitu Dinas Kebudayaan DIY, Biro Pemberdayaan Masyarakat SETDA DIY, dan Dinas Koperasi dan UMKM DIY serta diberikan pendampingan dari pihak UGM melalui Gerakan Global Gotong Royong Budaya (G2RT) yang bertujuan untuk menciptakan produk unggulan berupa olahan rempah-rempah dalam bentuk kristal.

Program yang diberikan oleh pemerintah tersebut menjadi solusi dimana masih ada beberapa permasalahan dalam UMKM yang sering terjadi khususnya di Kalurahan Pagerharjo seperti masih ada kendala dalam permasalahan pemasaran produk usaha. Hal ini terjadi karena masih banyak ritel modern yang belum bersedia untuk menerima produk-produk dari UMKM. Kebanyakan ritel modern yang menaruh persyaratan adanya perizinan di produk usaha, padahal perizinan tersebut seringkali sulit didapatkan bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM kesulitan dalam mendapatkan perizinan tersebut seperti izin usaha maupun izin produk sehingga produk usaha yang dihasilkan belum bisa masuk di ritel modern. Oleh karena itu, pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Pagerharjo diberikan pendampingan dan pelatihan untuk mengetahui strategi pemasaran dan prosedur yang harus dilakukan untuk mewujudkan kegiatan pemasaran yang baik bagi UMKM.

Permasalahan lain yang masih sering terjadi pada UMKM di Kalurahan Pagerharjo yaitu keterbatasan modal kerja, distribusi, dan rendahnya produktifitas tenaga kerja yang akan berakibat pada kualitas barang yang dihasilkan menjadi rendah dan kemampuan teknologi yang semakin berkembang. Dari permasalahan tersebut, pemerintah dengan melalui lembaga terkait memberikan dukungan dan dorongan bagi pelaku UMKM dengan mengadakan berbagai macam pelatihan. Pelatihan yang diberikan seperti pelatihan mengenai bagaimana cara mengelola produksi yang baik, pelatihan tentang prosedur atau tata cara untuk mendapatkan izin usaha (P-IRT, BPOM, dan Halal) untuk produk usaha, pelatihan inovasi untuk pengemasan produk, pelatihan pemasaran berbasis digital, dan lain-lain. Setelah adanya kegiatan pelatihan ini nantinya akan dievaluasi juga untuk mengetahui dan memantau bagaimana jalannya kegiatan usaha setelah mengikuti kegiatan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan tujuan pengembangan usaha pada UMKM itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh program Desa Preneur yang meliputi pendampingan dan pelatihan terhadap pengembangan usaha masyarakat. Oleh karena itu, adapun judul dalam penelitian ini yakni “Analisis Pengaruh Program Desa Preneur Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yakni :

1. Bagaimana pengaruh pendampingan terhadap pengembangan usaha secara parsial dalam program Desa Preneur di Kalurahan Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo?

2. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap pengembangan usaha secara parsial dalam program Desa Preneur di Kalurahan Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo?
3. Bagaimana pengaruh pendampingan dan pelatihan terhadap pengembangan usaha secara simultan dalam program Desa Preneur di Kalurahan Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendampingan terhadap pengembangan usaha secara parsial dalam program Desa Preneur di Kalurahan Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo
2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap pengembangan usaha secara parsial dalam program Desa Preneur di Kalurahan Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo
3. Untuk mengetahui pengaruh pendampingan dan pelatihan terhadap pengembangan usaha secara simultan dalam program Desa Preneur di Kalurahan Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum serta sumbangan pemikiran mengenai kondisi program pemberdayaan UMKM melalui program Desa Preneur terhadap pengembangan usaha pada masyarakat khususnya di Kalurahan Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti yang lainnya jika diperlukan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yaitu sebagai wadah untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai pelaksanaan program Desa Preneur. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan untuk pihak-pihak yang berkompeten terhadap bidang pembangunan dalam rangka merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan mendatang pada pelaksanaan program Desa Preneur dengan baik serta efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang mengikuti program tersebut.